

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis disharmonisasi kewenangan antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan peradilan umum dalam penyelesaian sengketa konsumen, dengan fokus pada studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 925 K/Pdt.Sus-BPSK/2025. Permasalahan utama dalam penelitian ini meliputi bagaimana pengaturan kewenangan BPSK dalam sistem hukum Indonesia, bagaimana bentuk disharmonisasi kewenangan antara BPSK dan peradilan umum dalam praktik penyelesaian sengketa konsumen, serta bagaimana implikasi yuridis dari disharmonisasi tersebut terhadap kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, serta doktrin hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui mekanisme non-litigasi, namun dalam praktiknya sering terjadi tumpang tindih kewenangan dengan peradilan umum, terutama terkait dengan kompetensi absolut dan kekuatan eksekutorial putusan BPSK. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 925 K/Pdt.Sus-BPSK/2025, Mahkamah Agung menegaskan adanya batasan kewenangan BPSK, sehingga tidak semua sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui BPSK. Disharmonisasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha, serta berpotensi memperpanjang proses penyelesaian sengketa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa disharmonisasi kewenangan antara BPSK dan peradilan umum disebabkan oleh ketidakjelasan pengaturan normatif serta perbedaan interpretasi dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penegasan batas kewenangan BPSK guna menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen di Indonesia.

Kata kunci: BPSK, sengketa konsumen, disharmonisasi

ABSTRACT

This study aims to conduct a juridical analysis of the disharmony of authority between the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) and the general courts in resolving consumer disputes, with a focus on Supreme Court Decision Number 925 K/Pdt.Sus-BPSK/2025. The main issues addressed in this research include how BPSK's authority is regulated within the Indonesian legal system, how the disharmony of authority between BPSK and the general courts manifests in practice, and what juridical implications arise from such disharmony in terms of legal certainty and consumer protection. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary legal sources, particularly Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and relevant court decisions, as well as secondary materials such as legal doctrines, journals, and scholarly literature. The analysis is conducted qualitatively through a deductive reasoning method. The results of the study indicate that, normatively, BPSK is authorized to resolve consumer disputes through non-litigation mechanisms. However, in practice, there is often an overlap of authority with the general courts, particularly concerning absolute competence and the executorial power of BPSK decisions. In Supreme Court Decision Number 925 K/Pdt.Sus-BPSK/2025, the Supreme Court emphasizes the limitations of BPSK's authority, indicating that not all consumer disputes fall within its jurisdiction. This disharmony leads to legal uncertainty for both consumers and business actors and may prolong the dispute resolution process. In conclusion, the disharmony of authority between BPSK and the general courts is caused by unclear normative regulations and differing interpretations in judicial practice. Therefore, regulatory harmonization and a clearer delineation of BPSK's authority are necessary to ensure legal certainty and enhance the effectiveness of consumer protection in Indonesia.

Keywords: BPSK, consumer disputes, disharmony.